



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
((RENJA PERUBAHAN PD))

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

TAHUN 2025

TANJUNGPANDAN, JULI 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Tahun 2026 ini adalah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

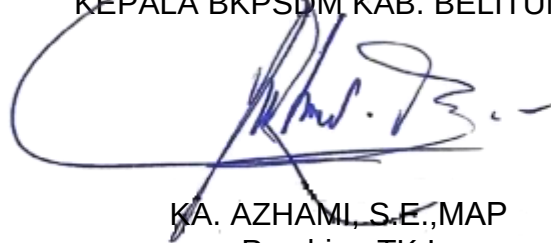
Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 masih memuat gambaran keadaan masa depan (visi dan misi serta sasaran – sasaran strategis) yang ingin diwujudkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2026 untuk jangka waktu 1 (Satu tahun) dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam lingkungan organisasi. Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi pedoman oleh segenap aparatur di jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mewujudkan visi dan misi Kabupaten serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan juga Rencana Operasional implementasi tugas pokok dan fungsi secara optimal.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja

Kami menyadari bahwa dalam isi dan penyajian dokumen ini tentunya masih dimungkinkan terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, dimohon kritik dan saran yang membangun dari pihak - pihak yang berkepentingan untuk perbaikan selanjutnya. Demikian laporan ini disusun untuk digunakan seperlunya.

Tanjungpandan, Juli 2025
KEPALA BKPSDM KAB. BELITUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KA. AZHAMI, S.E., MAP', is written over a large, faint circular stamp or watermark.

KA. AZHAMI, S.E., MAP
Pembina TK.I
NIP 197606012001121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penyusunan	4
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	7
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Triwulan II 2025	 9
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	 29
BAB IV Penutup	38

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perencanaan pembangunan pada perangkat daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja perubahan dan penganggarnya. Sesuai dengan Visi RPJMD 2025-2029 yakni Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, dan Misi ke 3 (tiga) yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat, maka BKPSDM menetapkan rencana strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Sejalan dengan arah kebijakan dari pusat maupun daerah yang bersifat dinamis berakibat pada perubahan arah kebijakan pembangunan. Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut bersinergi dengan perubahan arah kebijakan keuangan yakni kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan

arah kebijakan keuangan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan arah kebijakan keuangan tersebut maka disusunlah Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);
 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
 15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14);
 18. Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/530.A/KEP/BAPPEDA/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta merumuskan solusi dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 - 2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan BKPSDM 2025 adalah menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Capaian Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Strategi Peningkatan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Akhir Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.2. Program Kerja dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP

2.1 Capaian Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi terhadap Renja perlu dilakukan untuk menilai apakah program/kegiatan tahunan dalam Renja Perangkat Daerah telah memenuhi target capaian indikator yang ditetapkan. Adapun Renja 2025 merupakan tahun pertama dari proyeksi program kegiatan tahun 2025-2029, sehingga segala hal yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan percepatan pencapaian target indikator 5 (lima) tahun bertumpu pada rencana tahun 2025.

Dalam menyusun program /kerja dalam dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 memerlukan hasil reuiu terhadap evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan. Hal ini untuk memetakan program/kegiatan yang memerlukan percepatan atau penyelesaian target – target selama tahun anggaran berjalan. BKPSDM Kabupaten Belitung memiliki 3 program dan 10 kegiatan dengan 24 sub kegiatan. Ketiga program tersebut sampai dengan Trwiulan II capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

BKPSDM Kabupaten Belitung pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.820.373.759,- dengan komposisi yang telah mengacu pada Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan perundangan itu anggaran terbagi menjadi tiga program yaitu: Pertama, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan belanja gaji dan tunjangan ASN serta operasional. Kedua, program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari kegiatan pengadaan ASN, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi ASN. Ketiga, program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi teknis aparatur.

BKPSDM Kabupaten Belitung pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran induk sebesar Rp 12.820.373.759,- dan pada harmonisasi anggaran menjadi Rp. 10.920.025.033,- dan sampai Triwulan II sudah terealisasi sebesar 37,96 % atau sebesar Rp 4.146.235.780,-. Adapun pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II terealiasasi sebesar Rp.3.310.442.351,- atau sebesar 46,20 % dari anggaran sebesar Rp. 7.166.074.946,- Dalam hal ini realisasi untuk

program tersebut sudah cukup tinggi dan ada beberapa subkegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

Sedangkan pada program Kepegawaian Daerah, sampai dengan Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 820.418.429,- atau sebesar 35,47 % dari anggaran Rp. 2.312.924.431,- yang terdiri dari kegiatan Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN atau tugas belajar yang sudah terealisasi sebesar 52,80 % dan untuk kegiatan yang lain volume kegiatannya akan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Pada program pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.025.656,- yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional. Dimana sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 15.375.000,- atau sebesar 1,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.441.025.656,-. Hal ini dikarenakan kegiatan Asessmen, Diklatpim dan Prajabatan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV, serta terdapat penyesuaian kegiatan sehingga harus disesuaikan pada pergeseran maupun perubahan anggaran.

Rincian realisasi anggaran belanja langsung yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

N o.	Nama Program	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2025		Realisasi	Lebih Kurang	% Keuangan	% Fisik	Penjelasan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.525.520.332	7.166.074.946	3.310.442.351	3.855.632.595	46,20	50,00	
	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.490.930	6.490.930	-	6.490.930	0,00	50,00	
1.	Sub Kegiatan :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.994.185	3.994.185	-	3.994.185	0,00	0,00	
2.	Sub Kegiatan :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.496.745	2.496.745	-	2.496.745	0,00	0,00	
	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.039.125.688	6.039.125.688	3.023.403.454	3.015.722.234	50,06	50,00	
3.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.035.602.538	6.035.602.538	3.023.403.454	3.012.199.084	50,09	50,00	
4.	Sub Kegiatan :	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.523.150	3.523.150	-	3.523.150	0,00	0,00	
	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	75.000.000	5.121.295	69.878.705	6,83	50,00	
6.	Sub Kegiatan :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	75.000.000	5.121.295	69.878.705	6,83	4,20	
	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.428.764	378.255.368	109.616.049	268.639.319	28,98	50,00	
8.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.995.990	13.995.990	3.522.000	10.473.990	25,16	25,40	
9.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.855.910	111.982.239	32.191.500	79.790.739	28,75	16,60	

10.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.996.543	15.996.543	5.459.500	10.537.043	34,13	30,60	
11.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.755.321	102.955.596	42.040.200	60.915.396	40,83	29,50	
12.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.825.000	41.825.000	5.678.400	36.146.600	13,58	14,40	
13.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	3.060.000	3.940.000	43,71	21,30	
14.	Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.000.000	84.500.000	17.664.449	66.835.551	20,90	16,70	
	Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.263.680	-	-	-	0,00	0,00	
15.	Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.263.680	-	-	-	0,00	0,00	
	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.196.800	398.196.800	148.168.253	250.028.547	37,21	50,00	
16.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.984.000	6.984.000	1.400.000	5.584.000	20,05	35,00	
17.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.500.000	258.500.000	91.471.253	167.028.747	35,39	33,60	
18.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800	132.712.800	55.297.000	77.415.800	41,67	41,70	
	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.014.470	269.006.160	24.133.300	244.872.860	8,97	50,00	
19.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.976.920	67.962.960	8.183.300	59.779.660	12,04	15,40	
20.	Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.048.850	101.048.850	15.950.000	85.098.850	15,78	10,40	
21.	Sub Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.988.700	99.994.350	-	99.994.350	0,00	0,00	

	Kepegawaian Daerah		2.744.982.559	2.312.924.431	820.418.429	1.492.506.002	35,47	50,00	
	Kegiatan :	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	849.115.465	587.867.481	77.820.342	510.047.139	13,24	50,00	
22.	Sub Kegiatan :	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	425.892.774	333.815.990	77.820.342	255.995.648	23,31	6,60	
23.	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	271.672.731	166.072.731	-	166.072.731	0,00	0,00	
24.	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.750.000	36.178.800	-	36.178.800	0,00	0,00	
25.	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Data Kepegawaian	98.799.960	51.799.960	-	51.799.960	0,00	0,00	
	Kegiatan :	Mutasi dan Promosi ASN	421.340.300	413.240.300	49.952.500	363.287.800	12,09	50,00	
26.	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Mutasi ASN	84.733.000	76.633.000	11.005.000	65.628.000	14,36	24,70	
27.	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Promosi ASN	336.607.300	336.607.300	38.947.500	297.659.800	11,57	11,60	
	Kegiatan :	Pengembangan Kompetensi ASN	1.474.526.794	1.311.816.650	692.645.587	619.171.063	52,80	50,00	
28.	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.474.526.794	1.311.816.650	692.645.587	619.171.063	52,80	50,00	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.549.870.868	1.441.025.656	15.375.000	1.425.650.656	1,07	50,00	
	Kegiatan :	Pengembangan Kompetensi Teknis	332.297.688	269.800.400	-	269.800.400	0,00	50,00	
29.	Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	332.297.688	269.800.400	-	269.800.400	0,00	50,00	

	Kegiatan :	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.217.573.180	1.171.225.256	15.375.000	1.155.850.256	1,31	50,00	
30.	Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.217.573.180	1.171.225.256	15.375.000	1.155.850.256	1,31	50,00	
			Rp 12.820.373.759	Rp 10.920.025.033	Rp 4.146.235.780	Rp 6.773.789.253	37,96	50,00	

Dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Trwulan I Tahun 2025 dapat terlihat kegiatan yang belum maksimal diantaranya yaitu : pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi anggarannya masih sebesar 1,07 % yang dikarenakan beberapa kegiatan seperti Asesmen, Diklatpim dan Prajabatan banyak dilaksanakan pada triwulan III, sehingga sampai bulan juni realisasi anggaran belum cukup besar, serta terdapat beberapa penyesuaian kegiatan sehingga harus disesuaikan pada pergeseran maupun perubahan anggaran.

2.2. Strategi Peningkatan Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Sampai Akhir Tahun 2025

Adapun strategi yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Belitung guna meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun yaitu dengan menyusun anggaran perubahan dengan keterangan sebagai berikut :

1) Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BKPSDM Kabupaten Belitung melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi hingga triwulan kedua. Penjadwalan ulang ini penting agar sisa waktu di semester kedua dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan penjadwalan yang lebih realistis dan terukur, pelaksanaan kegiatan bisa lebih terarah dan tidak menumpuk di akhir tahun.

2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Monitoring dan evaluasi (monev) bulanan harus diperkuat agar progres kegiatan dapat dipantau secara lebih intensif. Monev ini harus disertai dengan analisis hambatan serta solusi tindak lanjut agar setiap unit kerja memiliki tanggung jawab atas pencapaian program yang telah direncanakan.

3) Mengoptimalkan Proses Administrasi dan Penyiapan Dokumen Pendukung

BKPSDM Kabupaten Belitung juga perlu mempercepat penyusunan dokumen seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen pendukung SPJ, dan lainnya. Proses administrasi yang lambat sering kali menjadi penyebab keterlambatan realisasi, sehingga perlu adanya sistem percepatan yang efisien.

4) Melakukan Evaluasi Kegiatan yang Tidak Dapat Direalisasikan dan Mengusulkan Realokasi Anggaran

Bagi kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi karena alasan teknis atau regulasi, sebaiknya segera dievaluasi dan diusulkan untuk direalokasi. Anggaran tersebut bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih siap dilaksanakan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Sehingga pada anggaran perubahan ini, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akan dikeluarkan anggarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5) Menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Secara Berkala kepada Pimpinan

Penting juga bagi BKPSDM untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara rutin kepada pimpinan. Laporan ini menjadi dasar Rancangan Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 dalam mengambil keputusan strategis sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas progres kinerja perangkat daerah, sehingga pencapaian pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi agar terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan pelaksanaan 5 (lima) strategi tersebut secara konsisten, BKPSDM Kabupaten Belitung diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dan memastikan bahwa setiap anggaran yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian di Kabupaten Belitung. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM sampai dengan tahun 2025 :

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Renja Badan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap realisasi DPA BKPSDM Kabupaten Belitung. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi BKPSDM Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

P																									
N o	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00	-	100,00	8.129.165.279	100	7.170.355.273		1.566.749.173		1.743.693.178					100	3.310.442.351	100,00 %	46,17%	100,00	11.439.607.630		0,00 %
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00		70,00		71						90		126,08 %		70,00							
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		100,00		100						100		100,00 %		100,00							
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		100,00		100						100		100,00 %		100,00							

			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,0 0		100,0 0	100									10 0		100,00 %		100,0 0			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ()	-		5.420.600	0	-	2	-	-	-				2	-	0,00%	0,00%	0,00	5.420.600	0,00 %	0,00 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	3,00	2.970.200	3	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	3,00	2.970.200	0,00 %	0,00 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	3,00	2.450.400	3	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	3,00	2.450.400	0,00 %	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,0 0	-	3,00	6.003.643.83 0	2	6.265.602.538	1	1.430.373.68 5	-	1.593.029.76 9			1	3.023.403.45 4	50,00%	48,25%	3,00	9.027.047.284	0,00 %	0,00 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	38,42	5.999.741.43 0	41	6.265.602.538	38	1.430.373.68 5	41	1.593.029.76 9				-	3.023.403.45 4	0,00%	48,25%	38,42	9.023.144.884	0,00 %	0,00 %
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	2,00	3.902.400	2	-	1	-	-	-				1	-	50,00%	0,00%	3,00	3.902.400	0,00 %	0,00 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	0,0 0	-	38,50	245.873.255	42	52.500.000	38	-	41	5.121.295			-	5.121.295	0,00%	9,75%	38,50	250.994.550	0,00 %	0,00 %

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		-		0		-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	1,00	21.645.000	0	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	1,00	21.645.000	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	6,00	55.483.479	3	52.500.000	-	-	1	5.121.295			1	5.121.295	33,33%	9,75%	7,00	60.604.774	0,00%	0,00%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	350,00	168.744.776	0	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	350,00	168.744.776	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	1,00	553.420.918	100	290.544.485	-	54.744.800	-	54.871.249			-	109.616.049	0,00%	37,73%	1,00	663.036.967	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	1,00	14.000.000	1	9.793.308	-	-	-	3.522.000			-	3.522.000	0,00%	35,96%	1,00	17.522.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	2,00	113.371.200	2	78.384.537	-	21.528.000	-	10.663.500			-	32.191.500	0,00%	41,07%	2,00	145.562.700	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	1,00	16.000.000	1	11.188.800	-	3.831.000	-	1.628.500			-	5.459.500	0,00%	48,79%	1,00	21.459.500	0,00%	0,00%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	2,00	97.695.800	2	72.507.840	-	22.288.400	-	19.751.800				-	42.040.200	0,00%	57,98%	2,00	139.736.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	1,00	36.768.000	1	29.274.000	-	4.993.400	-	685.000				-	5.678.400	0,00%	19,40%	1,00	42.446.400	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	1,00	6.520.000	1	4.896.000	-	1.530.000	-	1.530.000				-	3.060.000	0,00%	62,50%	1,00	9.580.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	12,00	269.065.918	12	84.500.000	3	574.000	3	17.090.449				6	17.664.449	50,00%	20,90%	18,00	286.730.367	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)	0,00	-	2,00	605.560.000	0	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	2,00	605.560.000	0,00%	0,00%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		-	5,00	118.400.000	0	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	5,00	118.400.000	0,00%	0,00%
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-			0	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	29,00	487.160.000	6	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	29,00	487.160.000	0,00%	0,00%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-			0	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)	0,0 0	-	100,0 0	324.689.799	100	354.034.800	25	69.816.288	25	78.351.965				50	148.168.253	50,00%	41,85%	100,0 0	472.858.052	0,00 %	0,00 %
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	12,00	3.478.500	12	4.872.000	3	-	3	1.400.000				6	1.400.000	50,00%	28,74%	18,00	4.878.500	0,00 %	0,00 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	12,00	188.498.499	12	216.450.000	3	47.697.488	3	43.773.765				6	91.471.253	50,00%	42,26%	18,00	279.969.752	0,00 %	0,00 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	12,00	132.712.800	12	132.712.800	3	22.118.800	3	33.178.200				6	55.297.000	50,00%	41,67%	18,00	188.009.800	0,00 %	0,00 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)	0,0 0	-	3,00	390.556.877	3	207.673.450	-	11.814.400	-	12.318.900				-	24.133.300	0,00%	11,62%	3,00	414.690.177	0,00 %	0,00 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	17,00	120.579.085	22	67.192.960	4	4.414.400	4	3.768.900				8	8.183.300	36,36%	12,18%	25,00	128.762.385	0,00 %	0,00 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	175,0 0	99.150.000	79	70.556.040	30	7.400.000	10	8.550.000				40	15.950.000	50,63%	22,61%	215,0 0	115.100.000	0,00 %	0,00 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	1,00	170.827.792	1	69.924.450	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	1,00	170.827.792	0,00 %	0,00 %

		Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)		-	1,00	18.960.544	1	12.066.740	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	18.960.544	0,00%	0,00%		
		Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen Mutasi dan Promosi ASN (Dokumen)	0,00	-	3,00	33.087.329	5	487.747.000	1	3.030.000	1	46.922.500	1	96.540.587	2	239.922.126	5	386.415.213	100,00%	79,22%	3,00	419.502.542	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		-	2,00	21.495.000	4	63.336.000	-	3.030.000	2	7.975.000	1	16.345.000	1	28.157.500	4	55.507.500	100,00%	87,64%	6,00	77.002.500	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)		-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		-	2,00	11.592.329	1	424.411.000	-	-	-	38.947.500	-	80.195.587	1	211.764.626	1	330.907.713	100,00%	77,97%	3,00	342.500.042	0,00%	0,00%
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ()		-	22,00	1.491.871.157	17	1.160.810.520	17	638.242.467	-	54.403.120	-	155.181.643	-	139.427.669	17	987.254.899	100,00%	85,05%	22,00	2.479.126.056	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		-	24,00	1.491.871.157	17	1.160.810.520	17	638.242.467	-	54.403.120	-	155.181.643	-	139.427.669	17	987.254.899	100,00%	85,05%	41,00	2.479.126.056	0,00%	0,00%

		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur ()		-	1,00	5.960.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	5.960.000	0,00 %	0,00 %
		Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		-	110,00	5.960.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	110,00	5.960.000	0,00 %	0,00 %
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									99,38%	77,52%				
									Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi				
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional (%)	0,00	-	48,63	1.673.698.459	75	1.063.504.883	-	-	-	76.677.080	635.859.714	51	712.536.794	68,33%	67,00%	65,00	2.386.235.253	0,00 %		
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mendapatkan Kompetensi Minimal 20 JP Per Tahun (Orang)		-		648.744.962	53	229.889.180	-	-	-	40	11.708.000	-	111.152.314	-	0,00%	53,44%	0,00	771.605.276	0,00 %	0,00 %
			Jumlah ASN yang mendapatkan kompetensi teknis ()			90,00		15		-	-	-	5	5		10		66,67%		90,00		0,00 %	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)		-	184,00	648.744.962	17	229.889.180	-	-	-	5	11.708.000	10	111.152.314	15	88,24%	53,44%	199,00	771.605.276	0,00 %	0,00 %

		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Orang)	0,00	-	158,00	1.024.953.497	280	833.615.703	-	-	-	-	-	64.969.080	277	524.707.400	277	589.676.480	98,93%	70,74%	158,00	1.614.629.977	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)		-	1,00	1.024.953.497	1	833.615.703	-	-	-	-	-	64.969.080	1	524.707.400	1	589.676.480	100,00%	70,74%	2,00	1.614.629.977	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,46%	67,00%				
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang				
								10.195.211.294	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										32,20%	54,37%					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Rendah					

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Inpres No. 1 Tahun 2025 mengenai instruksi presiden yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi anggaran yang masih dalam proses yang menyebabkan kegiatan belum bisa dimaksimalkan;

Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
----------------	---

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG

No.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
								Target 2025				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana
								Sebelum		Sesudah		RENJA 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5		6		7	8	9	11
	5					Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	5	03				Bidang Urusan : Kepegawaian						10.517.960.353	10.270.502.891	9.169.918.911	
	5	03	01			1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						7.644.227.794	7.525.520.332	7.170.355.273	
							1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	%	100	%	6.110.014.080	6.045.616.618	6.265.602.538	
	5	03	01	2.01		1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	Dokumen	6.490.930	6.490.930	0	
							Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Peraturan	100	%	100	%				

1.	5	03	01	2.01	01	Subkegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	Dokumen	3.994.185	3.994.185	0	APBD
2.	5	03	01	2.01	07	Subkegiatan : 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	0	Laporan	2.496.745	2.496.745	0	APBD
	5	03	01	2.02		2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhiya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan	3 100	Dokumen %	3 100	Dokumen %	6.103.523.150	6.039.125.688	6.265.602.538	
3.	5	03	01	2.02	01	Subkegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/ Bulan	41	Orang/ Bulan	6.100.000.000	6.035.602.538	6.265.602.538	APBD
4.	5	03	01	2.02	08	Subkegiatan : 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	0	Dokumen	3.523.150	3.523.150	0	APBD
							2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah					123.310.000	100.000.000	52.500.000	
	5	03	01	2.05		3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	45	Orang	41	Orang	123.310.000	100.000.000	52.500.000	
5.	5	03	01	2.05	01	Subkegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0				0	0	0	

6.	5	03	01	2.05	02	Subkegiatan : 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	0	Paket	23.310.000	0	0	
7.	5	03	01	2.05	09	Subkegiatan : 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	8	Orang	100.000.000	100.000.000	52.500.000	APBD
8.	5	03	01	2.05	10	Subkegiatan : 4. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0		0		0	0	0	
							3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	%		%	532.428.764	501.428.764	290.544.485	
	5	03	01	2.06		4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	532.428.764	501.428.764	290.544.485	
							Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	%	100	%				
9.	5	03	01	2.06	01	Subkegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	13.995.990	13.995.990	9.793.308	APBD
10.	5	03	01	2.06	02	Subkegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	122.855.910	122.855.910	78.384.537	APBD
11.	5	03	01	2.06	03	Subkegiatan : 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	15.996.543	15.996.543	11.188.800	APBD
12.	5	03	01	2.06	04	Subkegiatan : 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	130.755.321	130.755.321	72.507.840	APBD

13.	5	03	01	2.06	05	Subkegiatan : 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	41.825.000	41.825.000	29.274.000	APBD
14.	5	03	01	2.06	06	Subkegiatan : 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dok	1	Dok	7.000.000	7.000.000	4.896.000	APBD
15.	5	03	01	2.06	09	Subkegiatan : 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	200.000.000	169.000.000	84.500.000	APBD
							4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	%	56.263.680	56.263.680	0	
	5	03	01	2.07		5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah	1	Jenis	0	Jenis	56.263.680	56.263.680	0	
							Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	0	%				
16.	5	03	01	2.07	01	Subkegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	0	0	
17.	5	03	01	2.07	05	Subkegiatan : 2. Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	0	0	
18.	5	03	01	2.07	06	Subkegiatan : 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	0	Unit	56.263.680	56.263.680	0	
19.	5	03	01	2.07	09	Subkegiatan : 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0	Unit	0	0	0	
							3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	%	100	%	398.196.800	398.196.800	354.034.800	

	5	03	01	2.08		6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	398.196.800	398.196.800	354.034.800	
							Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	%	100	%				
20.	5	03	01	2.08	01	Subkegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	6.984.000	6.984.000	4.872.000	APBD
21.	5	03	01	2.08	02	Subkegiatan : 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	258.500.000	258.500.000	216.450.000	APBD
22.	5	03	01	2.08	04	Subkegiatan : 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	132.712.800	132.712.800	132.712.800	APBD
							4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	%	424.014.470	424.014.470	207.673.450	
	5	03	01	2.09		7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	3	Jenis	3	Jenis	424.014.470	424.014.470	207.673.450	
							Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	%				
23.	5	03	01	2.09	01	Subkegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	17	Unit	17	Unit	122.976.920	122.976.920	67.192.960	APBD
24.	5	03	01	2.09	06	Subkegiatan : 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	Unit	111	Unit	101.048.850	101.048.850	70.556.040	APBD

25.	5	03	01	2.09	09	Subkegiatan : 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	199.988.700	199.988.700	69.924.450	APBD
	5	03	02			Program : Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Sesuai Ketentuan	100	%	100	%	2.873.732.559	2.744.982.559	1.999.563.638	
	5	03	02	2.01		1. Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Keluaran : Laporan Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Hasil : Terkelolanya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	4 100	Laporan %	4 100	Laporan %	849.115.465	849.115.465	312.793.618	
26.	5	03	02	2.01	02	Subkegiatan : 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	425.892.774	425.892.774	227.815.817	APBD
27.	5	03	02	2.01	08	Subkegiatan : 2. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	1	Lembaga	271.672.731	271.672.731	51.339.861	APBD
28.	5	03	02	2.01	10	Subkegiatan : 3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	52.750.000	52.750.000	21.571.200	APBD
29.	5	03	02	2.01	11	Subkegiatan : 4. Pengelolaan Data Kepegawaian	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	98.799.960	98.799.960	12.066.740	APBD
	5	03	02	2.02		2. Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Keluaran : Dokumen Mutasi dan Promosi ASN Hasil : Kesesuaian ASN dengan Syarat Jabatannya	5 100	Dokumen %	5 100	Dokumen %	421.340.300	421.340.300	525.959.500	

30.	5	03	02	2.02	01	Subkegiatan : 1. Pengelolaan Mutasi ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	84.733.000	84.733.000	63.336.000	APBD
31.	5	03	02	2.02	02	Subkegiatan : 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	
32.	5	03	02	2.02	03	Subkegiatan : 3. Pengelolaan Promosi ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	336.607.300	336.607.300	462.623.500	APBD
	5	03	02	2.03		3. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Hasil : Meningkatnya Kompetensi ASN	21	Orang	17	Orang	1.603.276.794	1.474.526.794	1.160.810.520	
33.	5	03	02	2.03	04	Subkegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	21	Orang	17	Orang	1.603.276.794	1.474.526.794	1.160.810.520	APBD
	5	03	02	2.04		4. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keluaran : Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Hasil : Kinerja Aparatur yang terukur	0	Laporan	0	Laporan	0	0	0	
34.	5	03	02	2.04	07	Subkegiatan : 1. Pembinaan Disiplin ASN	Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0		0	Orang	0	0	0	
	5	04				Bidang Urusan : Pendidikan dan Pelatihan						2.860.082.798	2.549.870.868	1.063.504.883	
	5	04	02			Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	100	%	100	%	2.860.082.798	2.549.870.868	1.063.504.883	

	5	04	02	2.01		1. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis	190	Orang	17	Orang	375.337.688	332.297.688	229.889.180	
							Hasil : Meningkatnya Kompetensi teknis ASN	100	%		%				
35.	5	04	02	2.01	03	Subkegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	190	Orang	17	Orang	375.337.688	332.297.688	229.889.180	APBD
	5	04	02	2.02		2. Kegiatan : Sertifikasi, Kelembangaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.036	Orang	451	Orang	2.484.745.110	2.217.573.180	833.615.703	
							Hasil : Meningkatnya kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	100	%	100	%				
36.	5	04	02	2.02	07	Subkegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1	Laporan	1	Laporan	2.484.745.110	2.217.573.180	833.615.703	APBD
	JUMLAH											13.378.043.151	12.820.373.759	10.233.423.794	

Bab IV	PENUTUP
---------------	----------------

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Belitung Nomor 000.7.2.4/0281/BAPPERIDA/2025 tanggal 11 April 2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam Menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.